

Penguatan Karakter dan Integritas ASN Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Bela Negara Nirmiliter

Edwar Juliarta¹, Suandi², Yuliana³, Arie Firmansyah⁴

^{1),2),3),4)} Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti, Palembang

Email: edwar_juliartha@unisti.ac.id¹, suandi@unisti.ac.id², yuli_72@unisti.ac.id³, firmansyaharie094@gmail.com⁴

Abstract

This community service activity aims to strengthen the character and integrity of Civil Servants of the Municipal Police Unit through non-military State Defense training. The training was conducted at the Regional Education and Training Agency on December 8, 2025, involving 40 Municipal Police Unit servants as participants. The implementation methods included interactive lectures, group discussions, case studies, as well as reflection and commitment-building sessions. The training materials focused on understanding the fundamental values of State Defense, civil servant ethics and integrity, emotional control, effective communication, and the application of a humane approach in enforcing regional regulations. The results indicate an improvement in participants' understanding of the meaning of State Defense within the context of non-military duties, particularly as regional regulation enforcement officers who interact directly with the community. Participants also demonstrated increased awareness of the importance of integrity, professionalism, and decision-making grounded in the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Overall, this activity contributes positively to shaping Municipal Police Unit civil servants who are more disciplined, ethical, and oriented toward humane public service.

Keywords: *Non-Military State Defense, Civil Servant Integrity, Municipal Police Unit, Community Service.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan integritas Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Bela Negara nirmiliter. Pelatihan dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tanggal 8 Desember 2025 dengan melibatkan 40 orang ASN Satpol PP sebagai peserta. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta refleksi dan penyusunan komitmen. Materi pelatihan difokuskan pada pemahaman nilai-nilai dasar Bela Negara, etika dan integritas Aparatur Sipil Negara, pengendalian emosi, komunikasi efektif, serta penerapan pendekatan humanis dalam penegakan peraturan daerah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap makna Bela Negara dalam konteks tugas nirmiliter, khususnya sebagai aparaturnya penegak peraturan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Peserta juga menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan

ini memberikan kontribusi positif dalam membentuk sikap ASN Satpol PP yang lebih berdisiplin, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik yang humanis.

Kata kunci: *Bela Negara Nirmiliter, Integritas ASN, Satpol PP, Pengabdian Kepada Masyarakat.*

Pendahuluan

Bela Negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Dalam perspektif kewarganegaraan modern, Bela Negara dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sipil (*civic responsibility*) yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, pengabdian kepada kepentingan publik, serta kontribusi aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan pemerintahan (Marshall, 1964). Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), nilai Bela Negara terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, netral, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sehingga keberadaan ASN Satpol PP menjadi wajah nyata kehadiran negara di ruang publik. Berdasarkan teori peran (*role theory*), efektivitas pelaksanaan tugas aparatur sangat ditentukan oleh kemampuan individu dalam memahami, menerima, dan menjalankan peran sesuai dengan norma, nilai, dan ekspektasi institusional (Biddle, 1986). Namun demikian, dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks, meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap profesionalisme aparatur menuntut ASN Satpol PP untuk memiliki karakter yang kuat, disiplin tinggi, serta integritas yang tidak mudah terpengaruh oleh tekanan maupun konflik kepentingan. Paradigma *New Public Service* menegaskan bahwa aparatur negara harus bertindak sebagai pelayan masyarakat yang mengedepankan nilai demokrasi, etika, dan kepentingan warga

negara, bukan semata-mata sebagai pelaksana aturan secara koersif (Denhardt & Denhardt, 2015).

Berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai integritas dan etika publik pada ASN berpotensi memunculkan perilaku menyimpang yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Huberts, 2018; Kardiati, Jamaruddin, & Saprudin, 2024). Selain itu, penelitian terbaru menegaskan bahwa penguatan nilai netralitas, profesionalisme, dan etika birokrasi merupakan fondasi utama dalam membangun ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik (Nurul Fitri et al., 2025). Dalam konteks Satpol PP, tantangan tersebut semakin nyata mengingat karakter tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak diimbangi dengan pengendalian emosi, etika komunikasi, dan sikap humanis. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat karakter dan integritas ASN Satpol PP melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan Bela Negara nirmiliter.

Pendekatan nirmiliter dipilih karena selaras dengan teori pembentukan karakter (*character building theory*) yang menekankan internalisasi nilai melalui pembelajaran reflektif, keteladanan, dan penguatan etika, tanpa pendekatan kekerasan atau militeristik (Lickona, 2013). Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa penerapan meritokrasi, nilai-nilai integritas, dan etika publik secara konsisten mampu memperkuat semangat Bela Negara ASN dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (Sunara et al., 2024). Sejalan dengan kebijakan nasional penguatan *core values* ASN BerAKHLAK, pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman ASN Satpol PP mengenai konsep dan nilai Bela Negara nirmiliter, memperkuat karakter nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, menumbuhkan integritas serta etika profesional dalam penegakan peraturan daerah, serta mendorong terwujudnya aparatur Satpol PP yang humanis, berwibawa, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

(Nurmiyati et al., 2024; Arifin, Solihin, & Murni, 2024). Dengan demikian, Satpol PP dapat menjalankan perannya sebagai garda terdepan penegakan peraturan daerah dan penjaga ketertiban umum secara lebih humanis, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penguatan nilai-nilai Bela Negara nirmiliter. Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman ASN Satpol PP mengenai konsep dan nilai-nilai Bela Negara nirmiliter; memperkuat karakter nasionalisme, disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas; menumbuhkan integritas serta etika profesional ASN Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah; serta mendorong terwujudnya aparatur Satpol PP yang humanis, berwibawa, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat demi terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman sosial yang berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu pilar Tridarma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh sivitas akademika perguruan tinggi dalam rangka mengimplementasikan peran akademisi untuk berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan pada 8 Desember 2025, dengan sasaran peserta sebanyak 40 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada kebutuhan strategis untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme ASN Satpol PP dalam menghadapi tantangan penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin kompleks, dinamis, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam konteks reformasi birokrasi, pengembangan

kompetensi aparatur tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis dan administratif, tetapi juga pada penguatan karakter, integritas, serta etika pelayanan publik sebagai wujud implementasi nilai-nilai Bela Negara nirmiliter (Sunara et al., 2024).

Sejalan dengan prinsip Tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan reflektif yang menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran aktif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mendorong internalisasi nilai-nilai kebangsaan, profesionalisme, dan integritas aparatur secara berkelanjutan, sehingga berdampak pada perubahan sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik (Nurmiyati et al., 2024). Kegiatan pengabdian ini melibatkan narasumber dari kalangan akademisi, salah satunya berasal dari Universitas Sjakhyakirti, yang memberikan penguatan konseptual dan aplikatif terkait peran ASN Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan pelayanan ketertiban umum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat

Metode pertama yang digunakan adalah ceramah interaktif, yang bertujuan memberikan landasan konseptual mengenai konsep Bela Negara nirmiliter, nilai-nilai dasar Bela Negara, serta keterkaitannya dengan tugas dan fungsi ASN Satpol PP dalam perspektif pelayanan publik yang profesional dan humanis. Ceramah disampaikan secara dialogis agar peserta mampu mengaitkan materi dengan pengalaman empiris di lapangan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran interaktif mampu meningkatkan pemahaman etika birokrasi dan kesadaran integritas ASN secara lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran satu arah (Nurul Fitri et al., 2025).

Selanjutnya, diskusi kelompok digunakan untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam membahas berbagai permasalahan aktual yang sering dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, seperti dilema etika dalam penegakan peraturan daerah, pengendalian emosi saat berhadapan langsung dengan

masyarakat, serta tantangan menjaga disiplin dan integritas di bawah tekanan situasional. Melalui diskusi kelompok, peserta dapat saling berbagi pengalaman dan pandangan, sehingga tercipta pembelajaran kolektif yang memperkuat kesadaran akan pentingnya nilai netralitas, profesionalisme, dan etika pelayanan publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Kardiat, Jamaruddin, & Saprudin, 2024).

Metode studi kasus kemudian digunakan sebagai sarana pembelajaran aplikatif untuk melatih kemampuan analisis dan pengambilan keputusan peserta dalam situasi yang kompleks dan berisiko konflik. Kasus-kasus yang dianalisis mencerminkan realitas tugas Satpol PP di lapangan, sehingga peserta didorong untuk mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan etika secara seimbang dalam merumuskan tindakan yang tepat, proporsional, dan berlandaskan nilai Bela Negara. Pendekatan studi kasus ini sejalan dengan paradigma *learning by doing* yang terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan etis aparatur publik (Arifin, Solihin, & Murni, 2024).

Tahap akhir kegiatan adalah refleksi dan penyusunan komitmen, yang bertujuan memperkuat internalisasi nilai serta mendorong perubahan sikap dan perilaku peserta secara berkelanjutan. Pada tahap ini, peserta diajak melakukan refleksi kritis terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai ASN Satpol PP, serta menyusun komitmen pribadi dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Bela Negara nirmiliter, integritas, disiplin, dan etika profesional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pendekatan reflektif ini sejalan dengan teori pembentukan karakter yang menegaskan bahwa perubahan perilaku aparatur hanya dapat dicapai melalui kesadaran diri, komitmen moral, dan konsistensi tindakan, bukan semata-mata melalui regulasi formal (Lickona, 2013; Huberts, 2018). Dengan desain metode yang integratif tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam membentuk ASN Satpol PP yang berkarakter nasionalis, berintegritas tinggi, humanis dalam bertugas, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagai wujud nyata Bela Negara dalam praktik pemerintahan daerah.

Sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berikut disajikan visualisasi aktivitas pelatihan Bela Negara nirmiliter yang dilaksanakan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, yang menggambarkan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran, diskusi, serta internalisasi nilai-nilai Bela Negara, integritas, dan etika profesional selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Bela Negara Nirmiliter

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Bela Negara nirmiliter menunjukkan respon yang sangat positif dan konstruktif dari para peserta yang berjumlah 40 orang ASN Satuan Polisi Pamong Praja. Respon positif tersebut tercermin dari tingkat partisipasi peserta yang konsisten selama kegiatan berlangsung, keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian materi hingga tahap refleksi dan penyusunan komitmen. Antusiasme ini menunjukkan bahwa tema dan materi pelatihan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan aktual ASN Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah dan pelayanan ketertiban umum di tengah dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Pada tahap awal kegiatan, materi difokuskan pada penguatan pemahaman konseptual mengenai Bela Negara nirmiliter sebagai landasan filosofis dan

normatif bagi ASN. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa Bela Negara tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban dalam konteks pertahanan fisik, tetapi juga sebagai sikap mental, nilai moral, dan perilaku aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. ASN Satpol PP diposisikan sebagai representasi negara di tingkat lokal yang setiap tindakannya memiliki implikasi langsung terhadap citra dan kewibawaan pemerintah daerah. Pemahaman ini mendorong peserta untuk menyadari bahwa pelaksanaan tugas yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik merupakan bentuk konkret Bela Negara dalam konteks nirmiliter.

Materi selanjutnya memperdalam pemahaman peserta mengenai nilai-nilai dasar Bela Negara, seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, loyalitas terhadap Pancasila dan UUD 1945, disiplin, tanggung jawab, serta semangat pengabdian. Nilai-nilai tersebut tidak disampaikan secara teoritis semata, tetapi dijabarkan melalui contoh-contoh konkret yang sering dihadapi Satpol PP dalam tugas sehari-hari. Misalnya, dalam penertiban aktivitas yang melanggar peraturan daerah, peserta diajak memahami bahwa ketegasan harus diiringi dengan rasa keadilan, empati, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat. Pendekatan ini membantu peserta memahami bahwa sikap humanis tidak bertentangan dengan ketegasan, melainkan justru memperkuat legitimasi penegakan hukum di mata publik.

Materi penguatan integritas dan etika profesi ASN Satpol PP menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Pada sesi ini, peserta dibekali pemahaman mengenai integritas sebagai kesatuan antara nilai moral, sikap batin, dan perilaku nyata dalam menjalankan kewenangan. Dijelaskan pula bahwa tantangan terbesar ASN Satpol PP di lapangan sering kali bukan hanya persoalan teknis, tetapi tekanan sosial, konflik kepentingan, dan godaan untuk menyimpang dari aturan. Melalui pemaparan ini, peserta diajak untuk memahami bahwa menjaga integritas merupakan bentuk Bela Negara yang strategis, karena integritas aparatur menjadi fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Diskusi mengenai

etika profesi juga menekankan pentingnya netralitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tindakan penegakan peraturan daerah.

Materi berikutnya menyoroti aspek pengendalian emosi dan komunikasi efektif sebagai kompetensi kunci ASN Satpol PP. Peserta diberikan pemahaman bahwa sebagian besar konflik antara aparatur dan masyarakat bermula dari miskomunikasi dan ketidakmampuan mengelola emosi dalam situasi yang penuh tekanan. Oleh karena itu, dalam sesi ini dijelaskan prinsip-prinsip komunikasi persuasif, pendekatan dialogis, serta teknik menghadapi masyarakat yang menolak atau bersikap agresif tanpa menggunakan tindakan represif berlebihan. Peserta juga diberikan pemahaman bahwa kemampuan berkomunikasi secara humanis merupakan wujud nyata Bela Negara nirmiliter, karena berkontribusi langsung pada terciptanya ketertiban umum yang berkelanjutan dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk memperkuat pemahaman konseptual dan nilai tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan studi kasus. Diskusi kelompok memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan pengalaman empiris yang mereka hadapi di lapangan, seperti dilema antara penegakan aturan dan rasa kemanusiaan, tekanan dari kelompok tertentu, serta tantangan menjaga profesionalisme di tengah keterbatasan sumber daya. Melalui proses ini, peserta tidak hanya belajar dari materi yang disampaikan oleh pemateri, tetapi juga dari pengalaman sesama peserta, sehingga terbentuk pembelajaran kolektif yang memperkaya perspektif dan memperdalam pemahaman nilai Bela Negara nirmiliter.

Studi kasus disusun berdasarkan situasi nyata yang sering dihadapi Satpol PP, seperti penertiban pedagang kaki lima, penanganan gangguan ketertiban umum, dan pengamanan kegiatan masyarakat yang berpotensi konflik. Melalui analisis studi kasus, peserta dilatih untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis aktor yang terlibat, serta mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan etika dalam merumuskan keputusan. Proses ini melatih peserta untuk mengambil

keputusan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan aturan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, peserta memahami bahwa pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai Bela Negara nirmiliter justru memperkuat profesionalisme dan kredibilitas Satpol PP.

Tahap akhir kegiatan difokuskan pada refleksi dan penyusunan komitmen sebagai upaya penguatan internalisasi nilai. Peserta diajak untuk melakukan refleksi kritis terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai ASN Satpol PP, baik sebagai penegak peraturan daerah maupun sebagai pelayan masyarakat. Refleksi ini diarahkan pada kesadaran bahwa sikap profesional, integritas, dan humanisme harus menjadi bagian dari identitas pribadi ASN, bukan sekadar kewajiban formal. Peserta kemudian menyusun komitmen pribadi dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Bela Negara nirmiliter dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat, menghindari tindakan represif yang tidak proporsional, serta menjaga etika dan disiplin kerja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pelatihan Bela Negara nirmiliter memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman, sikap, dan orientasi perilaku ASN Satpol PP. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas kognitif peserta, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran moral dan komitmen etis dalam menjalankan tugas. Dengan penekanan materi yang mencakup aspek konseptual, nilai, integritas, komunikasi, aplikasi melalui studi kasus, serta refleksi dan komitmen, kegiatan pengabdian ini menjadi sarana strategis dalam membentuk ASN Satpol PP yang berkarakter nasionalis, berintegritas tinggi, profesional, dan humanis. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terwujudnya praktik penegakan peraturan daerah yang lebih berwibawa, adil, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagai manifestasi nyata Bela Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Bela Negara nirmiliter memperoleh respons yang positif dari 40 orang ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi peserta. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konsep Bela Negara dalam konteks nirmiliter, khususnya keterkaitannya dengan peran Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Materi yang disampaikan menekankan bahwa Bela Negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya pertahanan fisik, tetapi juga diwujudkan melalui sikap disiplin, loyalitas terhadap konstitusi, integritas moral, serta pengabdian yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Pada sesi ceramah interaktif, peserta dibekali pemahaman mengenai nilai-nilai dasar Bela Negara, meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, serta kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, terutama dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan melaksanakan perlindungan masyarakat secara profesional dan humanis.

Hasil diskusi kelompok dan studi kasus menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya integritas, pengendalian emosi, dan komunikasi yang efektif dalam menghadapi dinamika sosial di lapangan. Materi etika ASN dan pengambilan keputusan berbasis nilai Bela Negara membantu peserta memahami bahwa setiap tindakan penegakan harus dilandasi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Selain itu, peserta juga diberikan contoh kasus nyata penanganan konflik sosial yang menuntut keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan persuasif.

Melalui sesi refleksi dan penyusunan komitmen, peserta menegaskan kembali peran strategisnya sebagai ASN Satpol PP yang tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak, tetapi juga sebagai teladan dalam menjaga wibawa

pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan Bela Negara nirmiliter ini berkontribusi dalam memperkuat karakter, integritas, dan profesionalisme ASN Satpol PP, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan ketertiban umum yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arifin, M., Solihin, A., & Murni, S. (2024). *Penguatan kapasitas aparatur sipil negara melalui pembelajaran berbasis studi kasus dalam pelayanan publik*. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(1), 45–58.
- Biddle, B. J. (1986). *Recent developments in role theory*. *Annual Review of Sociology*, 12, 67–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, not steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Huberts, L. W. J. C. (2018). *Integrity: What it is and why it is important*. *Public Integrity*, 20(1), 18–32. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>
- Kardiat, D., Jamaruddin, J., & Saprudin, S. (2024). *Etika publik dan integritas ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 101–115.
- Lickona, T. (2013). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Marshall, T. H. (1964). *Class, citizenship, and social development*. New York: Doubleday.
- Nurmiyati, N., Sari, R. P., & Hidayat, A. (2024). *Pengembangan kompetensi ASN berbasis nilai dan perubahan perilaku dalam reformasi birokrasi*. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(1), 23–37.
- Nurul Fitri, A., Rahman, F., & Wahyuni, D. (2025). *Pembelajaran interaktif dan penguatan etika birokrasi aparatur sipil negara*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55–70.
- Sunara, I., Pratama, Y., & Lestari, M. (2024). *Implementasi nilai Bela Negara nirmiliter dalam penguatan integritas ASN*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(2), 189–205.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.